

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PETTA TIMUR KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NUR AISIAH TADETE

WELSON Y ROMPAS

JOORIE. M. RURU

Abstrak: *Pembangunan yang matang dan terencana merupakan salah satu aspek yang penting juga menjadi tolak ukur majunya suatu negara lewat perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal menentukan tujuan untuk kemajuan desa serta kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulannya secara umum. Peneliti menggunakan lima indikator yaitu menentukan tujuan, mengembangkan premis (pendapat), menentukan alternatif-alternatif tindakan dan mengevaluasi alternatif tersebut, memilih salah satu alternatif terbaik, menerapkan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. hal ini dilihat pada pembangunan fisik (kebutuhan masyarakat) dan pembangunan non fisik seutuhnya belum berjalan dengan baik masih banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi.*

Kata Kunci : *Perencanaan, Pembangunan, Desa.*

Abstrack: *Mature and planning development is one of the important aspects which is also a benchmark for the progress of a country through village development planning is the initial step to determine the goals for village progress and independence. This study aims to determine the development planning in petta village east tabukan subdistrict north of sangihe island regency. The method used in this research is descriptive qualitative method with inductive approach. Qualitative descriptive research with an inductive approach is a method that illustrates the problem or case that is based on the facts that are based on specific facts and then examined to solved the problem and draw conclusions generally. Researchers used five indicators namely determining goals, develop the premise (opinion), determine alternative-alternative actions and evaluate these alternative, choose one of the best alternatives, implement a plan and evaluate the results. Based on the results of reseach conducted that village development planning has not fully gone well. This is seen in physical development (community needs) and non-physical development as a whole has not gone well yet there are still many community needs that have not been met.*

Keywords : *Planning, Development, Village.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan mengali

sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dalam hal ini otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah kekuasaannya, meningkatkan pelayanan umum di daerahnya serta meningkatkan daya saing untuk daerahnya, Adapun fungsi otonomi daerah

yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada Tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut membuka cakrawala baru tentang besarnya arti desa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses sejarah bangsa ini.

Pembangunan yang matang dan terencana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi tolak ukur majunya suatu negara dan perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu diperlukannya perencanaan pembangunan yang baik dan efektif dalam bentuk Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) atau perencanaan pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif dan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi 2005). Perencanaan merupakan penentuan tindakan untuk waktu yang akan datang. Dimensi perencanaan dan fungsi perencanaan sangat penting karena merupakan strategi dan pondasi untuk mencapai sasaran dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini harus dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses secara berjangka meliputi: pertama, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun: oleh sebab itu RPJM-Desa harus disusun secara baik dan efektif yang berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat agar pelaksanaan dan sasaran pembangunan dapat dibentuk dalam proses pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dimusyawarahkan. Dengan demikian proses tersebut mampu dengan baik dan efektif, masalah dan penentuan tindakan. Kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP-Desa) atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun jika dalam pelaksanaan RKP desa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan APBK maka pembangunan yang telah dilaksanakan menyentuh dalam berbagai bidang.

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara pulau Sulawesi dengan pulau Mindanao (Filipina) serta berada dibibir Samudera Pasifik. Wilayah kabupaten ini memiliki 3 klaster, yaitu klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan Klaster Perbatasan, yang memiliki batas perairan internasional dengan Provinsi Davao Del Sur, Filipina sebagai daerah kepulauan dan di kategorikan daerah 3T yaitu, terdepan, terluar, tertinggal.

Desa Petta salah satu desa yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Di Kecamatan Tabukan Utara sendiri memiliki 24 desa.

Adapun permasalahan dalam perencanaan pembangunan di desa petta adalah pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dan BPD dan LPMD kewajiban dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan fasilitas yang diperlukan untuk masyarakat demi menunjang kegiatan atau usaha masyarakat dalam kesehariannya.

Dalam hal ini pemerintah yang ada didesa petta sendiri kurangnya pelaksanaan

dan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal dari pemerintah desa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan desa serta masyarakat sehingga untuk desa petta demi tercapainya pembangunan yang lebih baik sehingga perlu tenaga teknik yang mahir dalam pengawasan pelaksanaan kerja dilapangan dalam bidang infrastruktur pada perencanaan pembangunan di Desa Petta.

Pemerintah yang ada di Desa Petta Timur dalam mengawasi pelaksanaan kerja dilapangan terhadap pengawasan kegiatan infrastruktur desa sehingga untuk pengerjaan infrastruktur desa kurang efektif dan efisien sehingga pemerintah desa dalam menyiapkan untuk pengadaan bahan material desa kurang diawasi, bahkan upah kerja tidak sesuai dengan tenaga yang di keluarkan, sehingga masyarakat dalam pengerjaan infrastruktur desa hanya asal-asalan juga tidak efektif dan efisien dan tidak bertahan lama, sehingga dalam melakukan pengerjaan infrastruktur desa harus bisa bertahan dan berkelanjutan dan bisa di manfaatkan dengan baik dan juga bisa mendatangkan nilai rupiah untuk desa sendiri.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

William H. Newman 1975 Dalam Syafie inu kecana (2010) dalam bukunya berjudul

Administrative Action dengan gamblang mengatakan, bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dulu apa yang akan dikerjakan (*planning is deciding in advance what is to be done*).

2. Pengertian Pembangunan

Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Roger 1985 dalam H. Rochajat (2012). Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke dataran kehidupan masyarakat yang lebih baik, bukanlah merupakan fenomena baru. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginjar, 2006:23).

Pembangunan sebagai suatu proses transformasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat telah dianggap sebagai satu yang harus di tempuh oleh semua bangsa atau negara (Mohamad Fauzi Sukimi 2000). Pembahasan mengenai konsep pembangunan banyak dilakukan para ahli ekonomi pembangunan. Pembangunan merupakan fenomena normatif dan konsep berdasarkan nilai. Perkataan pembangunan umumnya ditafsirkan sebagai pertumbuhan dalam ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam meningkatkan kemajuan sebuah negara (Bishry 1993).

Saul M. Katz dalam Adam Ibrahim (2011) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas

dalam masyarakat dan bukan sekedar lainnya seperti perubahan pendapat perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja lainnya.

1. Dimensi Perencanaan pembangunan

Dalam hal ini dilihat dari dimensinya maka rencana dan perencanaan dapat dilihat dari dimensi:

a. Dimensi pendekatan dan kordinasi.

Menurut dimensi pendekatan dan kordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari: (Bappenas, 2008)

b. Perencanaan makro

Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini di kaji beberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variable ekonomi mikro. Perencanaan mikro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.

1. Perencanaan sectoral.

Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang di maksud dengan sector adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai ciri-ciri serta tujuan.

a. Perencanaan regional

b. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional

c. Menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan.

2. Perencanaan mikro.

Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan jabaran rencana-rencana baik mikro, sektoral, maupun sektoral, maupun regional kedalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaraannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan racangan kegiatan.

Dilihat dari dimensi waktu rencana dapat berupa rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka rencana jangka Panjang.

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Affifudin (2010) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif.

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati.

Sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan, pembangunan parsipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedapankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotoronyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam Penelitian digunakan pendekatan induktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulannya secara umum. Menurut Lexi J, Maleong (2012:6) mendefinisikan Penelitian kualitatif sebagai Penelitian yang langsung bersentuhan dengan objek penelitian untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi.

Penelitian ini difokuskan Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di kaji menggunakan teori Sri Wiludjeng (2007:61), langkah-langkah perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Tujuan yaitu sasaran atau target.
2. Mengembangkan Premis (pendapat atau rencana yang akan di jalankan) yaitu dasar pemikiran, alasan, asumsi (pendapat).
3. Menentukan alternatif-alternatif tindakan dan mengevaluasi alternative yaitu suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.
4. Memilih salah satu alternatif yang terbaik yaitu pengambilan keputusan lewat tindakan untuk mencapai tujuan pada suatu masalah.
5. Menerapkan rencana dan mengevaluasi hasilnya yaitu arah pencapaian, mengkaji

ketidakpastian serta mengetahui atau menguji suatu pilihan terbaik.

Informan yang dilibatkan merupakan 10 orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar peneliti adapun rincian informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa 1 (orang)
2. Seketaris desa 1 (orang)
3. BPD 1 (orang)
4. LPMD 1 (orang)
5. Aparat desa 2 (orang)
6. Masyarakat 4 (orang)

Hasil Penelitian

Perencanaan pembangunan desa pada hakikatnya dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakat dengan berdasarkan kepentingan banyak orang, untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui pembangunan dalam berbagai bidang yaitu pembangunan fisik dan non fisik yang menjadi prioritas dalam upaya pembentukan pembangunan yang lebih baik untuk sebuah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan yang terencana dengan baik dan di musyawarakan dengan baik maka akan terbentuknya pembangunan dan pemerataan dalam berbagai bidang, yang pada hakikat pelaksanaan pembangunan untuk sebuah kemajuan masyarakat serta kesejahteraan.

Pembangunan desa disusun secara partisipatif berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pada urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi atau potensi desa tersebut

yang mencakup pada perikanan, pariwisata dan kelautan. Perencanaan pembangunan desa akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lewat pembangunan fisik dan non fisik seutuhnya.

Dalam perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Petta ada beberapa bidang yang luas menjadi permasalahannya diantara adalah pembangunan fisik dan non fisik masih banyak masyarakat yang kemudian mengeluh atas ketidak puasan pembangunan yang telah di jalankan contohnya adalah peningkatan sarana dan prasarana contohnya peningkatan fasilitas jalan yang kemudian menjadi sebuah keinginan besar untuk masyarakat dan juga pengadaan fasilitas drainashe sangat diperlukan oleh masyarakat dan hanya menjadi sebuah kerinduan mengingat desa petta adalah desa pesisir kemudian masyarakat yang tinggal pada pesisir pantai kemudian ketika air hujan turun maka untuk menjaga agar tidak banjir pemerintah harus membuat drainase air mengalir agar tidak terjadi banjir dan air mengalir sampai ke pantai, ada juga untuk lewat peningkatan ekonomi masyarakat pemerintah harus selektif dalam meningkatkan wilayah kelautan dan mengembangkan wilayah pesisir. Untuk pembangunan non fisik dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pemerintah lebih meningkatkan partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pemerintah juga lebih memperhatikan memberdayakan usaha pengembangan ekonomi masyarakat.

Setelah mengevaluasi berbagai uraian diatas maka jelas bahwa perencanaan pembangunan desa tidak harus direncanakan tapi mampu bisa direalisasikan lewat pembangunan fisik dan non fisik pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat dan pemerintah juga harus melihat sisi dimana yang masyarakat butuhkan demi sebuah kepentingan dan kesejahteraan Bersama.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum berjalan dengan baik dalam menentukan tujuan pemerintah desa untuk kemajuan desa melalui Rpjmdes untuk masyarakat dalam membuat dan mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan pembangunan desa, baik itu pembangunan fisik (infrastruktur) maupun non fisik seutuhnya belum sepenuhnya dikerjakan untuk itu dalam menentukan tujuan pembangunan yang terjadi didesa petta belum di kerjakan dengan baik.
2. Dalam mengembangkan pendapat, ide-ide, gagasan, dasar pemikiran, alasan, pemerintah desa lewat musrembang desa maka pemerintah lebih melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya pembangunan kearah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan sepenuhnya untuk masyarakat.
3. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta program-program kerja yang telah di musyawarahkan belum mendapatkan hasil atau tindakan yang nyata dalam pembangunan fisik maupun non fisik contohnya adalah pemberdayaan masyarakat pada taraf peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan pembuatan ukm kurang di kembangkan tentu pemerintah harus lebih melihat alternatif tindakan dan mengevaluasi pada kebijakan yang sudah di terapkan sehingga bisa terealisasikan dengan baik.

4. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam memajukan arah perencanaan pembangunan desa yang lebih baik maka pemerintah memilih alternatif terbaik jika terdapat permasalahan yang terjadi di desa kembali lagi dimusyawarahkan agar keikutsertaan kepada pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu mengawasi.
5. Perencanaan pembangunan desa pemerintah hanya menerapkan rencana dan program-program serta kegiatan baik itu pembangunan infrastruktur desa demi menjamin pembangunan di segala bidang sesuai dengan musyawarah desa tanpa memikirkan program tersebut bisa terealisasikan.

Saran

Untuk mengetahui sebuah perencanaan yang baik, kiranya perlu memerhatikan beberapa hal yang sekiranya perlu di perhatikan di kemudian hari:

1. Pemerintah desa jangan terburu-buru dalam menentukan tujuan dalam musyawarah desa karena jika terburu-buru maka hasil atau program yang dicapai tidak efektif dan efisien karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terlaksanakan melalui pembangunan fisik (kebutuhan masyarakat) dan pembangunan non fisik.
2. Demi perencanaan pembangunan yang lebih baik maka mengembangkan premis atau pendapat yang di rencanakan dengan saling memberikan informasi untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang.
3. Untuk kemajuan dan kemandirian desa pemerintah dalam menyusun program atau kegiatan sehingga menentukan alternatif tindakan dan mengevaluasi alternatif harus melihat prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Layaknya pemerintah desa Lebih konsisten pada setiap keputusan yang diambil demi sebuah kesejahteraan masyarakat lewat kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan.
5. Pemerintah desa harus membuat rencana kegiatan seperti penyuluhan tentang pengetahuan masyarakat karena mengingat sisi keterampilan masyarakat ada untuk itu pemerintah desa harus mampu menerapkan rencana dan mengevaluasi alternatif sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat agar tercapai dan pemerintah mampu merencanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2006. *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan Spiritual*, Jakarta: Arga.
- Bafadal, Ibrahim 2011. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bappenas, 2008. Perencanaan menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi (<http://bappenas.go.id>) diakses pada 11/01/2017, pukul 12.05.
- Bishry, R. 1993. *Industrialization and Development. Quantifying Social and Ecological Impacts. Dalam Jayum Jawan, Ghazali Basri dan Zahid Emby (Pnyt)*. Human Ecology and Development. Serdang: Universitas Pertanian Malaysia.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Harun, H. Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyadi, Deddy. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafie, Inu kencana, 2010, *Ilmu Admin Publik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wiludjeng SP, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber-Sumber Lain

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pemendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa